



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
**KOTA MOJOKERTO**

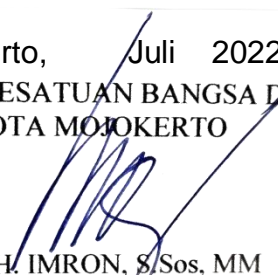
---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Mojokerto, Juli 2022  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO

  
MOCH. IMRON, S.Sos. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720828 199201 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>		<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>		<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..</b>	<b>7</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	40
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	43
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	48
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	61
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>62</b>
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	62
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	65
	3.3. Program dan Kegiatan .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PEN DANAAN PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>74</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 11.1	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	7
Tabel 11.2	Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021 .....	10
Tabel 11.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 .....	22
Tabel 11.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto .....	42
Tabel 11.5	Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	46
Tabel 11.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	49
Tabel 11.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	61
Tabel 111.1	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	65
Tabel 111.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) .....	67
Tabel 111.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	69
Tabel 1V.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Walikota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu : **"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mendukung misi Kepala Daerah yang kelima yaitu : ***Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yag Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila.***

Untuk mendukung misi kelima Kepala Daerah Kota Mojokerto didukung dengan Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yaitu :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)
2. Prosentase konflik SARA yang diselesaikan
3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan
4. Nilai SAKIP
5. Indeks Kepuasan Masyarakat
6. Indeks Manajemen Risiko

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);



26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 97/E);
33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto;
34. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 yaitu :

1. Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS;

2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PEN DANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tahun 2021 yang didasarkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto serta Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada APBD tahun berjalan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra adalah sebagai berikut :

**TABEL II.1.**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	1. Prosentase Konflik Ipoleksosbud Yang Diselesaikan	100%	92,86%	92,86%
			2. Prosentase Konflik Sara Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
			3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan	68,55%	68,55%	100%

- Realisasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021 sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. PROSENTASE KONFLIK IPOLEKSOSBUD YANG DISELESAIKAN**

Pada Tahun 2021 penetapan target untuk indikator tujuan prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan adalah 100 % sedangkan realisasi dari target indikator dimaksud sebesar 92,86 %. Hal ini disebabkan telah terjadi 14 kali konflik (unjuk rasa) terkait ekonomi, politik dan sosial. Yang dapat diselesaikan sebanyak 13 kali konflik melalui mediasi antara pihak yang berkonflik difasilitasi oleh Bakesbangpol dan jajarannya.

Jumlah Potensi Konflik sebanyak 14 Konflik, yaitu :

1. Jumlah konflik Ideologi : -
2. Jumlah konflik politik : 7
3. Jumlah konflik ekonomi : 5
4. Jumlah konflik social : 2
5. Jumlah konflik budaya : -

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala terkait capaian kinerja tersebut :

1. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol dalam rangka upaya mediasi dan mencegah adanya demo yang akan dilakukan agar tidak sampai anarkis
2. Bakesbangpol kedepan akan melakukan komunikasi yang lebih intensif agar terjadi kesepakatan guna mencegah terjadinya demo/ unjuk rasa, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Mojokerto tetap kondusif dan stabilitas politik di daerah tetap terjaga
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) dalam rangka antisipasi terjadinya konflik di masyarakat.
4. Mengoptimalkan peran forum-forum mitra Bakesbangpol ( FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, FKUB yang telah ada untuk mengantisipasi timbulnya gejala di masyarakat yang dapat mengganggu kondisivitas daerah.

### **2. PROSENTASE KONFLIK SARA YANG DISELESAIKAN**

Pada Tahun 2021 penetapan target untuk Persentase konflik SARA yang diselesaikan adalah 100% dan realisasi dari target dimaksud sebesar 100%. Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik SARA yang diselesaikan

dibanding jumlah konflik SARA yang ada dikali 100%, dengan target 100 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 100 %, jadi pada Tahun 2021 tidak ada konflik yang terjadi.

Langkah-langkah agar situasi lebih kondusif, yaitu antara lain :

1. Pemberian sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan
2. Pembinaan yang dilakukan oleh mitra kerja Bakesbangpol antara lain Forum Komunikasi Umat Beragama /FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan / FPK kepada 18 Kelurahan se Kota Mojokerto
3. PeningkatankKoordinasi dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan

### **3. PROSENTASE LSM / ORMAS / P ARPOL YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN**

Penetapan target untuk indikator Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan adalah 68,55 % dan realisasi dari target dimaksud sebesar 68,55 %. Target indikator dimaksud adalah Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibanding jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada dikali 100 % dengan target 68,55 % terealisasi 68,55 %, sehingga diperoleh capaian 100 %.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas LSM/ORMAS/Parpol adalah kurangnya pembinaan LSM/ORMAS/Parpol yang ada di Kota Mojokerto secara menyeluruh dan berkelanjutan.

***Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:***

1. Melakukan pembinaan dengan LSM/ORMAS/Parpol secara berkelanjutan.
2. Melakukan koordinasi dengan anggota/fungsionaris LSM/ORMAS/Parpol, secara berkelanjutan

- Sedangkan untuk capaian pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 11.2.**  
**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Nama Program/Kegiatan	Indikator / Outcome	Kinerja		Keuangan	
			Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	4.609.085.343	4.139.586.226
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>36.402.454</b>	<b>33.786.200</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	16 dokumen	16 dokumen	28.978.454	26.985.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Buku Profil yang disusun	10 buku	10 buku	7.424.000	6.800.300
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.201.644.848</b>	<b>2.992.008.275</b>

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	3,085,876.939	2.891.602.875
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	10 orang	10 orang	112.860.000	97,540.000
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	2.907.909	2.865.400
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	<b>120 potong</b>	<b>120 potong</b>	<b>51.274.000</b>	<b>40.925.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian khusus	120 potong	120 potong	51.274.000	40.925.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>612.868.348</b>	<b>522.171.800</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8 macam	8 macam	8.692.908	8.685.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	28 macam	28 macam	231.442.586	208.928.100
		Jumlah Kebutuhan computer dan kelengkapannya	10 macam	10 macam		
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	28 macam	28 macam	43.417.999	42.622.500
	Penyediaan Barsang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang sediakan	8 macam	8 macam	45.789.310	30.668.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang –undangan yang dibaca/dimanfaatkan	2 macam	2 macam	16,281,454	14.105.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	1200 kotak	1200 kotak	267,244.091	217.163.000
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	200 kali	200 kali		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>83.646.700</b>	<b>80.560.000</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	10 unit	10 unit	83.646.700	80.560.000



Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	11 unit	11 unit		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, tugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>260.076.500</b>	<b>235.214.251</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	88.476.500	66.988.897
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	6 orang	6 orang	171.600.000	168.225.354
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>363.172.493</b>	<b>234.920.700</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	7 unit	7 unit	156.731.999	124.035.000

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	secara berkala				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	35 unit	35 unit	31.000.000	31.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	1 init	1 init	175.440.494	79.885.700
<b>2</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi</b>	<b>4.90%</b>	<b>4.90%</b>	<b>962.395.409</b>	<b>444.406.300</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Prosentase masyarakat yang mengikuti Pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi</b>	<b>4.90%</b>	<b>4.90%</b>	<b>962.395.409</b>	<b>444.406.300</b>

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan bela Negara, cerdas cermat dan revolusi mental	4 kali		962.395.409	444.406.300
		Jumlah kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan, rakor tim PPWK, rakor	1 kali			
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas/ Parpol yang Aktif</b>	<b>68.55%</b>	<b>68.55%</b>	<b>853.467.285</b>	<b>199.816.500</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas/ Parpol yang aktif</b>	<b>68.55%</b>	<b>68.55%</b>	<b>853.467.285</b>	<b>199.816.500</b>

	<b>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>					
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan parpol	4 laporan	4 laporan	853.467.285	199.816.500
Jumlah parpol yang terdaftar dan yang dibina		9 Parpol 1 keg	9 Parpol 1 keg			
Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat		11 kali	11 kali			
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan dan</b>	<b>Persentase LSM/Ormas yang aktif</b>	<b>68.55%</b>	<b>68.55%</b>	<b>283.873.196</b>	<b>236.574.700</b>

	<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase LSM/Ormas yang aktif</b>	<b>68,55 %</b>	<b>68,55 %</b>	<b>283.873.196</b>	<b>236.574.700</b>
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah LSM/ ormas yang berpartisipasi dalam jambore	300 orang	300 orang	283.873.196	236.574.700
	Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah LSm/Ormas yang mengikuti forum diskusi antar ormas	100 orang	100 orang		
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Parpol / Lsm/ormas yang dibina	50 orang	50 orang		
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase konflik SARA yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>664.242.993</b>	<b>309.057.100</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase konflik SARA yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>664.242.993</b>	<b>309.057.100</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Deseminasi,Rakor dan sosialisasi P4GN	8 kali	8 kali	664.242.993	309.057.100
Jumlah Rakor FKUB,sosialisasi PBM dan Hibah		10 kali	10 kali			
Jumlah Rakor Tim Intruksi Hari Besar Keagamaan		5 kali	5 kali			
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>92,86%</b>	<b>2.581.150.330</b>	<b>1.322.727.700</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>2.581.150.330</b>	<b>1.322.727.700</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelatihan intelejen 1 dan 2	2 kali	2 kali	1.333.652.987	1.065.577.700	
	Jumlah pembinaan FKDM dan fasilitas ketahanan bangsa	10 kali	10 kali			
	Jumlah pembinaan wilayah	12 kali	12 kali			
	Jumlah Rakor tim PKS	10 kali	10 kali			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Rakor forpimda, Tim pora, Tim Verifikasi Hibah dan Hibah	48 kali	15 kali	1.247.497.343	257.150.000	

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
---	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, dapat dikemukakan bahwa indikator kinerja baik program, kegiatan maupun sub kegiatan sebagian besar telah tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra dapat ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

**TABEL II.3.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**  
**KOTA MOJOKERTO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
1.05.01.01.12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %
1.05.01.01.12. 01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik, internet dan PDAM kantor yang dibayarkan tepat waktu	60 bulan	24 bulan	-	-	-	-	24 bulan	100 %
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	36 unit	14 unit	-	-	-	-	14 unit	100 %

Jumlah Pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	50 orang	20 orang	-	-	-	-	20 orang	100 %
Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarka tepat waktu	20 orang	8 orang	-	-	-	-	8 orang	100 %
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	250 unit	100 unit	-	-	-	-	100 unit	100 %
Jumlah ATK yang disediakan	135 macam	54 macam	-	-	-	-	54 macam	100 %
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 macam	16 macam	-	-	-	-	16 macam	100 %
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	55 macam	22 macam	-	-	-	-	22 macam	100 %
Jumlah bahan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	10 macam	4 macam	-	-	-	-	4 macam	100 %
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	185 macam	74 macam	-	-	-	-	74 macam	100 %
Jumlah makan minum kantor yang disediakan	6000 kotak	240 kotak 0	-	-	-	-	2400 kotak	100 %
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	1000 kali	400 kali	-	-	-	-	400 kali	100 %

1.05.01.01.12. 02	Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	55 unit	22 unit	-	-	-	-	22 unit	100 %
		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	50 unit	20 unit	-	-	-	-	20 unit	100 %
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	20 unit	8 unit	-	-	-	-	8 unit	100 %
		Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	5 unit	2 unit	-	-	-	-	2 unit	100 %
		Jumlah petugas keamanan gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	10 orang	4 orang	-	-	-	-	4 orang	100 %
		Jumlah pakaian khusus	300 potong	120 potong	-	-	-	-	120 potong	100 %
	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	35 dokumen	14 dokumen	-	-	-	-	14 dokumen	100 %
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Peubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	55 dokumen	22 dokumen	-	-	-	-	22 dokumen	100 %	

	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku profil yang disusun	50 buku	20 buku	-	-	-	-	20 buku	100 %
1.05.01.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/ mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	5.18 %		-	-	-	-		
1.05.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat	850 orang	340 orang	-	-	-	-	340 orang	100 %
		Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	15 perusahaan	6 perusahaan	-	-	-	-	6 perusahaan	100 %
		Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan	40 kali	16 kali	-	-	-	-	16 kali	100 %
1.05.01.01.17.07	Fasilitasi dan koordinasi upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, Hari Jadi Kota, Hari Santri yang diselenggarakan sesuai SOP	115 kali	46 kali	-	-	-	-	46 kali	100 %
1.05.01.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif	70.44 %		-	-	-	-		

1.05.01.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	1000 orang	400 orang	-	-	-	-	400 orang	100 %
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam Jambore	1000 orang	400 orang	-	-	-	-	400 orang	100 %
		Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti Forum Diskusi Ormas	500 orang	200 orang	-	-	-	-	200 orang	100 %
1.05.01.01.21.03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	1800 orang	720 orang	-	-	-	-	720 orang	100 %
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	45 Parpol	18 Parpol	-	-	-	-	18 Parpol	100 %
		Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	20 Laporan	8 Laporan	-	-	-	-	8 Laporan	100 %
1.05.01.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.01.01.23.07	Pemantapan kewaspadaan Nasional	Jumlah Rakor FKDD, FKDM dan fasilitasi ketahanan bangsa	135 kali	54 kali	-	-	-	-	54 kali	100 %

		Jumlah Rakor Tim Tepadu Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	30 kali	12 kali	-	-	-	-	12 kali	100 %
		Jumlah peserta deseminasi P4GN	500 orang	200 orang	-	-	-	-	200 orang	100 %
1.05.01.01.23.08	Pembinaan kewilayahan	Jumlah pembinaan wilayah	90 Kelurahan	36 Kelurahan	-	-	-	-	36 Kelurahan	100 %
		Jumlah Rakor Forkopimda yang diselenggarakan	40 kali	16 kali	-	-	-	-	16 kali	100 %
		Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	5 kali	0	-	-	-	-	-	-
1.05.01.01.23.09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik SARA yang ditangani	5 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	100 %
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	65 kali	26 kali	-	-	-	-	26 kali	100 %
		Jumlah Rakor FKUB	50 kali	20 kali	-	-	-	-	20 kali	100 %
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	20 kali	8 kali	-	-	-	-	8 kali	100 %

8. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
8.01	PERENCANAAN									
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun</b>	24 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	16 dokumen	67 %
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	24 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	16 dokumen	67 %
8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</b>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN dibayarkan tepat waktu	42 transaksi	-	12 bulan	14 transaksi	100 %	14 transaksi	28 transaksi	67 %
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	36 bulan	-	12 bulan	12 transaksi	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %



8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	33 dokumen	-	17 dokumen	17 dokumen	100 %	8 dokumen	25 dokumen	76 %
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	<b>360 potong</b>	-	<b>120 potong</b>	<b>120 potong</b>	100 %	<b>120 potong</b>	<b>240 potong</b>	<b>67 %</b>
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	120 potong	-	120 potong	120 potong	100 %	120 potong	240 potong	67 %
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	100 %	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	36 bulan	-	12 bulan	11 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 bulan	-	12 bulan	27 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	36 bulan	-	12 bulan	4 unit	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	36 bulan	-	12 bulan	8 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 bulan	-	12 bulan	8 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %

8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	36 bulan	-	12 bulan	21 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	36 bulan	-	12 bulan	1200 macam	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
		Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 bulan	-	12 bulan	200 orang	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	63 unit	-	21 unit	21 unit	100 %	21 unit	42 unit	67 %
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu</b>	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %

8.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	95 %	-	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
8.01.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	36 bulan	-	12 bulan	7 unit	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	36 bulan	-	12 bulan	50 unit	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
8.01.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	3 unit	-	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	33 %
8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi</b>	5.18 %	-	4.90 %	4.90 %	4.90 %	5.04 %	5.04 %	5.04 %

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan	138 kali	-	46 kali	46 kali	100 %	46 kali	92 kali	67 %
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	2 perusahaan / tahun	-	2 perusahaan / tahun	2 perusahaan / tahun	100 %	-	--	-
		Jumlah peserta bela negara & cerdas cermat	100 orang	-	100 orang	100 orang	100 %		--	-
		Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	100 orang	-	100 orang	100 orang	100 %		--	-
		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	23 kali		23 kali	23 kali	100 %			
		Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	45 kali	-	15 kali	15 kali	100 %	15 kali	30 kali	67 %

		Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	72 kali	-	24 kali	24 kali	100 %	24 kali	48 kali	67 %
		Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	21 kali	-	7 kali	7 kali	100 %	7 kali	14 kali	67 %
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif</b>	70.4 % 4	-	68.5 % 5	68.5 % 5	100 %	69.4 % 9	69.4 % 9	69.4 % 9

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.	9 parpol 9 kali	-	9 parpol 3 kali	9 parpol 3 kali	100 %	9 parpol 3 kali	9 parpol 6 kali	67 %
8.01.03.2.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	12 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan	8 laporan	67 %

	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina (bantuan keuangan 9 Parpol), verifikasi bantuan keuangan Parpol, Bintek keuangan Parpol serta hibah Pemilukada serentak 2024	9 parpol kegiatan	-	9 parpol kegiatan	9 parpol kegiatan		9 parpol kegiatan	9 parpol kegiatan	67 %
		Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat, generasi muda, pemilih pemula, tokoh masyarakat & disabilitas	9 kali	-	600 orang	600 orang	100 %	3 kali	6 kali	67 %
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase LSM/Ormas yang aktif</b>	70.4 % 4	-	68.5 % 5	68.5 % 5	100 %	69.4 % 9	69.4 % 9	69.4 % 9
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Ormas yang dibina dan dimonitoring	116 ormas	-	50 ormas	50 ormas	100 %	16 ormas	66 ormas	57 %

8.01.04.2.01.0 3	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas	8 kali	-	2 kali	100 orang	100 %	2 kali	4 kali	50 %
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore	6 kali	-	2 kali	100 orang	100 %	2 kali	4 kali	67 %
		Jumlah Parpol/LSM/Ormas yang dibina	6 kali	-	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	4 kali	67 %
8.01.04.2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	6 kali	-	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	4 kali	67 %
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase konflik SARA yang ditangani</b>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	63 kali	-	45 kali	45 kali	100 %	45 kali	54 kali	86 %
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rakor FKUB	8 kali	-	8 kali	8 kali	100 %	-	-	-
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	10 kali	-	10 kali	10 kali	100 %	-	-	-
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	4 kali	-	4 kali	4 kali	100 %	-	-	-
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	14 kali	-	14 kali	14 kali	100 %	-	-	-
		Hibah FKUB	3 kali	-	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	2 kali	67 %
		Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	24 kali	-	8 kali	8 kali	100 %	8 kali	16 kali	67 %

8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani</b>	100 %	-	100 %	92.8 % 6	92.8 % 6	100 %	100 %	100 %
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>	130 kali	-	43 kali	43 kali	100 %	44 kali	87	67 %
8.01.06.2.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	87 kali	-	29 kali	29 kali	100 %	29 kali	58 kali	67 %

8.01.06.2.01.0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	7 kali	-	2 kali	2 kali	100 %	3 kali	5 kali	71 %
8.01.06.2.01.0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah silaturahmi Forpimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	36 kali	-	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	24 kali	57 %

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam menganalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tentunya memiliki indikator-indikator yang terukur. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- ▶ Adapun indikator kinerja utama Badan Keatuan Bangsa dan Politik Mojokerto sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
  1. Prosentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan
  2. Prosentase konflik sara yang diselesaikan
  3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan
- ▶ Indikator sasaran Badan Keatuan Bangsa dan Politik Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  1. Prosentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)
  2. Prosentase konflik sara yang diselesaikan
  3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan
  4. Nilai SAKIP
  5. Indeks Kepuasan Masyarakat
  6. Indeks Manajemen Resiko
  7. Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik
- ▶ Indikator sasaran Badan Keatuan Bangsa dan Politik Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  1. Prosentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)
  2. Prosentase konflik sara yang diselesaikan
  3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan
  4. Nilai SAKIP
  5. Indeks Kepuasan Masyarakat
  6. Indeks Manajemen Resiko

Secara ringkas, realisasi dan pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

**TABEL II.4.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA MOJOKERTO**

No	Indikator Sasaran	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan			100%	-	-	-	92.86%	-	-	-	
2	Prosentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan ((Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
3	Prosentase konflik sara yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan			68.55%	69.49%	70.44%	72.05%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai SAKIP			BB	A	A	A	BB	BB	A	A	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat			85.18	86.09	86.17	86.50	85.27	85.39	-	-	
7	Indeks Manajemen Resiko			1	2	3	2	-	1.5	2	2	
8	Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik			-	100%	-	-	-	100%	-	-	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengembangan dan Peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dan seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Mojokerto secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dihadapkan pada permasalahan dan hambatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Selain hambatan dan permasalahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga dihadapkan pada tantangan dan peluang antara lain:

► **Tantangan :**

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antara wilayah Kabupaten / Kota disekitar Mojokerto Raya yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal;
2. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah;
3. Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi unjuk rasa / demonstrasi yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang menurut mereka tidak tepat;
4. Minimnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan budaya di lingkungannya;
5. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman;
6. Meningkatnya pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat;
7. Lunturnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;

8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik terutama pemilih pemula;
9. Kurangnya kegiatan sosialisasi politik kepada masyarakat;
10. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ipoleksosbud.

► **Peluang :**

1. Bakesbangpol selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas dibidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional sebagai bahan pengambilan keputusan;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
3. Pada tahun ini merupakan tahun pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesatuan bangsa dan politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol meliputi SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika berbangsa dan bernegara;
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan ;
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) ;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban ;
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan ;
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.



Dalam perkembangannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki beberapa isu strategis berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsinya. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan kendala, hambatan yang selama ini terjadi. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel di bawah ini :

**TABEL II.5.**

**ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

<b>NO</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>AKSI</b>	<b>SASARAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>MISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Antisipasi penanganan ormas / kelompok yang mengganggu situasi politik / keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan koordinasi dalam rangka cegah dini dan deteksi dini terkait kerawanan ormas / kelompok masyarakat yang mengganggu situasi politik / keamanan dan ketertiban masyarakat untuk dilakukan mediasi	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional Pada Tatanan Masyarakat yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila;
2	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021			
3	Menurunnya rasa kepedulian, rasa kesetiakawanan, rasa tolong menolong dan rasa kegotongroyongan pada masyarakat	Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) sinergitas, Komunikasi Sosial dan pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya			
4	Menurunnya nilai-nilai kesatuan, toleransi dan keberagaman di masyarakat	Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama			
5	Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Mojokerto	Pelaksanaan rencana aksi daerah tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN)			

6	Mitigasi resiko bernegara dari ancaman pemecah belah bangsa	Pelaksanaan pembedaan nilai-nilai pancasila			
7	Kecenderungan konflik sosial untuk kampanye hitam dengan memanfaatkan / dalih perbedaan etnis. Agama dan sebagainya untuk meningkatkan popularitas atau memperbanyak suara partai politik tertentu	Sosialisasi politik kepada masyarakat tentang bahaya kampanye hitam			
8	Wacana pemungutan suara secara online / digital (e-vote)	Sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara secara online (e-vote)			
9	Terorisme dan radikalisme merupakan pencerminan lemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat	Sosialisasi mengenai bahaya terorisme dan radikalisme bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia			

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Hasil identifikasi antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengurangan terhadap total pagu anggaran sebesar Rp. 5.235.720.814,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 282.783.184,-
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan berkurang sebesar Rp. 6.592.381,-
- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik berkurang sebesar Rp. 7.063.363.790,-
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertambah sebesar Rp. 1.812.646.908,-
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya bertambah sebesar Rp. 20.383.009,-
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar berkurang Rp. 281.577.744,-

Jadi total pagu anggaran Perangkat Daerah terdapat pengurangan sebesar Rp.7.351.533.915,-, dan penambahan sebesar Rp.2.115.813.101,- dari pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp.23.422.445.300,- Sehingga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.18.186.724.486,-

2. Untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggarannya dipindahkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD maka kita dapat melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel II.6.

**TABEL II.6.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**KOTA MOJOKERTO**

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Mojokerto	Nilai Sakip	A	4,241,462,333	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Mojokerto	Nilai Sakip	A	4,524,245,517	
			Indeks Manajemen Resiko	Level 3				Indeks Manajemen Resiko	Level 3		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.17				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.17		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	32,674,840	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	32,661,200	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	16 dokumen	32,674,840	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	16 dokumen	32,661,200	

8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>2,810,817,547</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>2,798,659,837</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan	12 transaksi	2,808,207,415	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan	12 transaksi	2,796,057,337	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 dokumen	2,610,132	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 dokumen	2,602,500	
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>33,743,582</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>37,719,324</b>	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan	120 potong	33,743,582	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan	120 potong	37,719,324	
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>691,455,663</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>953,936,654</b>	

8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	7,802,748	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	7,793,300
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket ATK yang disediakan	12 paket	94,002,197	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket ATK yang disediakan	12 paket	94,001,554
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	38,971,988	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	38,971,800
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	27,385,156	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	27,385,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	12 paket	14,614,239	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	12 paket	14,500,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Mojokerto	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	48 kali	508,679,335	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Mojokerto	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	48 kali	771,285,000
		Kota Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	48 laporan			Kota Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	48 laporan	
8.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ</b>	<b>100%</b>	<b>63,407,080</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ</b>	<b>100%</b>	<b>63,125,700</b>

8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan	21 unit	63,407,080	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan	21 unit	63,125,700	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	100%	212,534,124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	100%	241,950,000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah	12 transaksi	70,354,284	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah	12 transaksi	70,350,000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah	12 transaksi	142,179,840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah	12 transaksi	171,600,000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	95%	396,829,497	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	95%	396,192,802	



8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu	7 transaksi	137,451,292	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Mojokerto	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu	7 transaksi	137,442,800	
			Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	4000 liter				Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	4000 liter		
			Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	3 unit				Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	3 unit		
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik	55 unit	27,825,600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik	55 unit	27,460,000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	231,552,605	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Mojokerto	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	231,290,002	
37,469	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Kota Mojokerto	Jumlah kasus Ideologi	0 (zero)	981,638,083	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Kota Mojokerto	Jumlah kasus Ideologi	0 (zero)	975,045,702	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 dokumen	981,638,083	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 dokumen	975,045,702	

			<b>Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	20.%				<b>Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	20.%		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1.951 Orang	981,638,083	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1.951 Orang	975,045,702	
37,834	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik</b>	<b>70.44%</b>	<b>14,372,862,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik</b>	<b>70.44%</b>	<b>7,309,498,210</b>	

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Kota Mojokerto	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta daya politik	70.44%	14,372,862,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Kota Mojokerto	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta daya politik	70.44%	7,309,498,210	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 Orang	14,372,862,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	450 Orang	7,309,498,210	

38,200	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Kota Mojokerto	Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70.44%	339,769,821	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Kota Mojokerto	Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70.44%	2,152,416,729	
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	Kota Mojokerto	Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan	70.44%	339,769,821	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	Kota Mojokerto	Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan	70.44%	2,152,416,729	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	204,786,148	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	2,053,433,229	

8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18 laporan	134,983,673	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18 laporan	98,983,500	
38,565	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	0,05%	652,770,891	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	0,05%	673,153,900	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 dokumen	652,770,891	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 dokumen	673,153,900	
			Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70%				Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70%		

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	504 Orang	652,770,891	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	504 Orang	673,153,900	
38,930	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>2,833,942,172</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kota Mojokerto	<b>Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>2,552,364,428</b>	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Mojokerto	Persentase penanganan kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditangani sesuai SOP	90%	2,833,942,172	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Mojokerto	Persentase penanganan kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditangani sesuai SOP	90%	2,552,364,428	

8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	305 Orang	927,937,578	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	305 Orang	889,531,728	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31 Orang	998,616,213	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31 Orang	886,690,100	

8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	907,388,381	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	776,142,600	
<b>J U M L A H</b>					<b>23,422,445,300</b>	<b>J U M L A H</b>					<b>18,186,724,486</b>



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dan i pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di Kota Mojokerto, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah di Kota Mojokerto.

**TABEL II.7.**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**TAHUN 2023 KOTA MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di Kota Mojokerto, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah di Kota Mojokerto.	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan, dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan dan;
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Moderasi beragama, dan;
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
  - a. Pembangunan infrastuktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan, dan;
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
  - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - f. Peningkatan trasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pada level provinsi, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya adalah sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Jawa Timur cerdas dan sehat, pelayanan dasar berkualitas;
4. Membangun infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Berpedoman dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi;
2. Penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah;
4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing;
5. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mendukung program prioritas ke lima yaitu Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode 2018 - 2023 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat” Renja Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2022 42 Untuk mewujudkan visi Pembanguna Kota Mojokerto yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol Kota Mojokerto sesuai Misi 5 dari Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018 – 2023 sebagai berikut: “Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto perlu menetapkan tujuan dan sasaran kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

**TABEL III.1.  
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	1. Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%
			Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%
			Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70.44%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86.17
			Indeks Manajemen Resiko	Level 3

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

Dari sasaran di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menetapkan masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang berujung pada penetapan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tertuang dalam tabel III.2. sebagai berikut :

**TABEL III.2.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	Jumlah konflik yang terselesaikan tahun berkenaan dibanding jumlah potensi konflik yang terjadi tahun berkenaan dikalikan 100%	Data Monitoring Bidang Wasnas & Penanganan Konflik, Polres, Kodim, Kominda, FKDM,PKS	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	Jumlah konflik SARA yang terselesaikan tahun berkenaan dibanding jumlah potensi konflik SARA yang ada tahun berkenaan dikalikan 100%	Data Monitoring Bidang Iwasbang & Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama, FPK, FKUB	Bidang Iwasbang & Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama
3	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yg berpartisipasi aktif dalam pembangunan tahun berkenaan dibanding jumlah LSM/Ormas/Parpol yang ada dikalikan 100 %	Data Monitoring Bidang Poldagri & Organisasi Kemasyarakatan, Ormas, LSM, Parpol	Bidang Politik Dalam Negeri & Organisasi Kemasyarakatan
4	Nilai SAKIP	Nilai yang ditetapkan dalam evaluasi SAKIP	Evaluasi SAKIP	Sekretariat
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur tahun berkenaan dibanding Total Unsur yang terisi dikalikan Nilai Penimbang	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat
6	Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Manajemen Risiko yang berhasil disusun	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko	Sekretariat

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi – strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, maka pada tahun 2023 melaksanakan 6 (enam) Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, sebagaimana Tabel III.3, sebagai berikut :



**TABEL III.3.**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KOTA MOJOKERTO**

Nama Perangkat OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	<b>UUNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakib	Kota Mojokerto	A	4,524,245,517	APBD		A	5,114,245,517
		Indeks Manajemen Resiko		Level 3				Level 2	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86.17				86.50	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	100%	32,661,200	APBD		100%	32,661,200
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan		16 dokumen	32,661,200			16 dokumen	32,661,200
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	100%	2,798,659,837	APBD		100%	2,798,659,837
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan		12 transaksi	2,796,057,337			12 transaksi	2,796,057,337
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan		1 dokumen	2,602,500			1 dokumen	2,602,500
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	100%	37,719,324	APBD		100%	37,719,324

8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan		120 potong	37,719,324			120 potong	37,719,324
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>100%</b>	<b>953,936,654</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,253,936,654</b>
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 paket	7,793,300			1 paket	7,793,300
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan		12 paket	94,001,554			12 paket	394,001,554
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan		9 paket	38,971,800			9 paket	38,971,800
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 paket	27,385,000			12 paket	27,385,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 paket	14,500,000			12 paket	14,500,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan		48 kali	771,285,000			48 kali	771,285,000
		Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah		48 laporan				48 laporan	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>100%</b>	<b>63,125,700</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>173,125,700</b>
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan		21 unit	63,125,700			21 unit	173,125,700
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>100%</b>	<b>241,950,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>241,950,000</b>
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah		12 transaksi	70,350,000			12 transaksi	70,350,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah		12 transaksi	171,600,000			12 transaksi	171,600,000
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>95%</b>	<b>396,192,802</b>	<b>APBD</b>		<b>95%</b>	<b>576,192,802</b>
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu		7 transaksi	137,442,800			7 transaksi	137,442,800

		Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan		4000 liter				4000 liter	
		Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik		3 unit				3 unit	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik		55 unit	27,460,000			55 unit	27,460,000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor		1 paket	231,290,002			1 paket	411,290,002
<b>37,469</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah kasus Ideologi</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>0 (zero)</b>	<b>975,045,702</b>	<b>APBD</b>		<b>0 (zero)</b>	<b>1,023,797,987</b>
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Mojokerto	3 dokumen	975,045,702	APBD		3 dokumen	1,023,797,987
		Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Mojokerto	20.0%				20.0%	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Mojokerto	1.951 Orang	975,045,702			1.951 Orang	1,023,797,987
<b>37,834</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>70.44%</b>	<b>7,309,498,210</b>	<b>APBD</b>		<b>72.05%</b>	<b>42,309,498,210</b>
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta daya politik	Kota Mojokerto	70.44%	7,309,498,210	APBD		70.44%	42,309,498,210

8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Mojokerto	450 Orang	7,309,498,210			450 Orang	42,309,498,210
38,200	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan</b>	Kota Mojokerto	70.44%	2,152,416,729	APBD		72.05%	152,416,729
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan</b>	Kota Mojokerto	70.44%	2,152,416,729	APBD		70.44%	152,416,729
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	300 Orang	2,053,433,229			300 Orang	53,433,229
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Mojokerto	18 laporan	98,983,500			18 laporan	98,983,500
38,565	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Kota Mojokerto	0,05%	673,153,900	APBD		0,05%	706,811,595
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Mojokerto	2 dokumen	673,153,900	APBD		2 dokumen	706,811,595
		Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Mojokerto	70%				70%	

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Mojokerto	504 Orang	673,153,900			504 Orang	706,811,595
<b>38,930</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan</b>	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>100%</b>	<b>2,552,364,428</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,596,841,014</b>
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditangani sesuai SOP	Kota Mojokerto	90%	2,552,364,428	APBD		90%	2,596,841,014
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	305 Orang	889,531,728			305 Orang	934,008,314
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Mojokerto	31 Orang	886,690,100			31 Orang	886,690,100
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto	37 Dokumen	776,142,600			37 Dokumen	776,142,600

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja tahun 2022, identifikasi isu-isu penting bidang kesatuan bangsa dan politik, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Daerah.

Adapun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 disertai kebutuhan pendanaannya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

**TABEL IV.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>													
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									<b>18,186,724,486</b>				<b>51,903,611,052</b>
8.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									<b>32,661,200</b>				<b>32,661,200</b>
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	8 dokumen	100%	32,661,200	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	32,661,200
8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>2,798,659,837</b>				<b>2,798,659,837</b>
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	21 orang	100%	2,796,057,337	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	2,796,057,337
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	1 dokumen	100%	2,602,500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	2,602,500
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>37,719,324</b>				<b>37,719,324</b>
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	120 potong	100%	37,719,324	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	37,719,324

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									953,936,654			1,253,936,654
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	1 paket	100%	7,793,300	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	7,793,300
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket ATK yang disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	12 paket	100%	94,001,554	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	394,001,554
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	9 paket	100%	38,971,800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	38,971,800
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	12 paket	100%	27,385,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	27,385,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	12 paket	100%	14,500,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	14,500,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	48 kali	100%	771,285,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	771,285,000
		Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	48 laporan	100%		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	



<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>63,125,700</b>				<b>173,125,700</b>
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	21 unit	100%	63,125,700	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	173,125,700	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>241,950,000</b>				<b>241,950,000</b>
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	12 transaksi	100%	70,350,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	70,350,000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	12 transaksi	100%	171,600,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	171,600,000	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>396,192,802</b>				<b>576,192,802</b>
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	7 transaksi	100%	137,442,800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	137,442,800	
			Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik		A Level 3 86,17	4000 liter	100%						
			Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik		A Level 3 86,17	3 unit	100%						
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Kota Mojokerto	A Level 3 86,17	55 unit	100%	27,460,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2 86,50	27,460,000	

8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya barang milik daerah dengan balk	Kota Mojokerto	A Level 3	1 paket	100%	231,290,002	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Risiko Indeks Kepuasan Masyarakat	A Level 2	411,290,002
<b>37,469</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								<b>975,045,702</b>				<b>1,023,797,987</b>
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								<b>975,045,702</b>				<b>1,023,797,987</b>
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kasus Ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan, Rakor Dewan Penasehat, pengurus FPK serta Upacara Rutin , hari besar Nasional serta hari jadi kota yang diselenggarakan sesuai SOP	Kota Mojokerto	<b>0 (zero)</b>	1.951 Orang	100%	975,045,702	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus Ideologi	<b>0 (zero)</b>	1,023,797,987
<b>37,834</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>								<b>7,309,498,210</b>				<b>42,309,498,210</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah</b>								<b>7,309,498,210</b>				<b>42,309,498,210</b>
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terselenggaranya pendidikan politik masyarakat, pembinaan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD, verifikasi banpol serta pemantauan perkembangan politik sesuai rencana	Kota Mojokerto	<b>70.44%</b>	450 Orang	100%	7,309,498,210	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	<b>72.05%</b>	42,309,498,210
<b>38,200</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								<b>2,152,416,729</b>				<b>152,416,729</b>
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								<b>2,152,416,729</b>				<b>152,416,729</b>
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terselenggaranya jambore ormas, forum diskusi antar ormas serta pengawasan ormas	Kota Mojokerto	<b>70.44%</b>	300 Orang	100%	2,053,433,229	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	<b>72.05%</b>	53,433,229

8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sesuai rencana	Kota Mojokerto	70.44%	18 laporan	100%	98,983,500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	72.05%	98,983,500
<b>38,565</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								<b>673,153,900</b>					<b>706,811,595</b>
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								<b>673,153,900</b>					<b>706,811,595</b>
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya rakor ,sosialisasi P4GN,Rakor FKUB,Evaluasi Hibah serta Rakor Tim Intruksi Hari Besar Keagamaan sesuai perencanaan	Kota Mojokerto	0,05%	504 Orang	100%	673,153,900	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,05%	706,811,595
<b>38,930</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								<b>2,552,364,428</b>					<b>2,596,841,014</b>
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>								<b>2,552,364,428</b>					<b>2,596,841,014</b>
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya Pelatihan Intelijen Bagi Mitra Bakesbangpol , Pengamanan Wilayah (PUSKOMIN / KOMINDA), TIM FKDD DAN FKDM, dan Tom Pora sesuai rencana	Kota Mojokerto	100%	305 Orang	100%	889,531,728	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	934,008,314

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sesuai rencana	Kota Mojokerto	100%	31 Orang	100%	886,690,100	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	886,690,100
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai target	Kota Mojokerto	100%	37 Dokumen	100%	776,142,600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	776,142,600

## **BAB V**

### **PENUTUP**

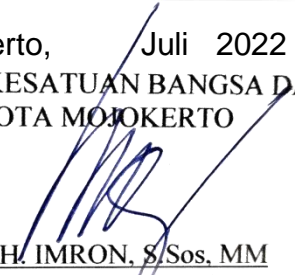
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2023.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-PD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, Juli 2022  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO

  
MOCH. IMRON, S.Sos. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720828 199201 1 001